

BUDAYA MELAYU DALAM BUDAYA BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATAM

Rahmayandi Mulda¹, Nurfadila², Ronald Parlindungan³, Meri Enita Puspita Sari⁴,
Nurhayati⁵

^{1,2,3,4,5} Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia.
rahmayandim@yahoo.co.id

ABSTRAK

Budaya lokal dalam birokrasi pemerintahan penting dikaji sebagai upaya memahami karakteristik budaya birokrasi di suatu daerah, seiring berkembangnya waktu dan zaman budaya lokal semakin menghilang. Tujuan penelitian ini peneliti berupaya melihat bagaimana budaya melayu tumbuh dan berkembang dilingkungan birokrasi pemerintahan di kota Batam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui budaya birokrasi pemerintah daerah kota Batam sebagai salah satu pusat kebudayaan melayu. Metode penelitian digunakan adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana peneliti menggunakan pendekatan wawancara kepada pihak yang memiliki keterkaitan terhadap objek yang diteliti seperti aparatur sipil negara dan masyarakat, pendekatan dokumentasi menganalisis dokumen baik dalam bentuk buku, gambar, maupun media lainnya yang memiliki kaitan terhadap objek penelitian dan pendekatan observasi dilapangan melihat secara langsung dan melakukan interaksi lebih mendalam terhadap objek penelitian. Adapun hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan menggunakan beberapa indikator budaya melayu seperti nilai keterbukaan dan kebenaran, penghargaan, kerja sama, kesepahaman, penyesuaian diri, kesantunan, pemaparan, kesantunan, kepercayaan dan bertimbang rasa, ditemukan bahwa budaya melayu masih tumbuh dan berkembang dilingkungan birokrasi pemerintah kota Batam. hal tersebut dapat dilihat dari berbagai unsur materil dan non materil seperti cara berkomunikasi dan corak bangunan serta cara berpakaian.

Kata Kunci: Budaya; Melayu; Birokrasi; Pemerintah.

ABSTRACT

Local culture in government bureaucracy is important to study as an effort to understand the characteristics of bureaucratic culture in a region. As time goes by, local culture is increasingly disappearing. The aim of this research is to see how Malay culture grows and develops within the government bureaucracy in the city of Batam. The aim of the research is to determine the bureaucratic culture of the regional government of Batam City as one of the centers of Malay culture. The research method used is a descriptive qualitative method where the researcher uses an interview approach to parties who are related to the object under study such as state civil servants and society, a documentation approach analyzes documents in the form of books, pictures and other media that are related to the research object and the observation approach in the field sees directly and interacts more deeply with the research object. The results of this research found that by using several indicators of Malay culture such as the values of openness and truth, respect, cooperation, understanding, self-adaptation, politeness, forgiveness, politeness, trust and consideration, it was found that Malay culture is still growing and developing in the government bureaucratic environment. Batam city. This can be seen from various material and non-material elements such as the way of communicating, the style of the building and the way of dressing.

Keywords: Culture; Melayu; Bureaucracy; Government.

PENDAHULUAN

Budaya birokrasi menarik dikaji secara mendalam saat ini karena birokrasi merupakan salah satu kunci dalam mendorong kemajuan bangsa dan negara, persoalan yang sering dikaitkan dengan birokrasi adalah budaya korupsi yang semakin sulit diurai dalam dinamika kebangsaan saat ini, selain itu kinerja birokrasi dinilai belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, utamanya dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Perilaku berkaitan dengan kemampuan dan kualitas pegawai dalam pelaksanaan pekerjaannya sehingga mampu mengidentifikasi bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan baik dan bagaimana menggunakan sumber-sumber daya yang ada dalam proses organisasi dan pelayanan untuk mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Kota Batam merupakan daerah kepulauan, dimana masyarakatnya memiliki berbagai macam etnis suku bangsa yang ada di Indonesia. masyarakat Kota Batam terdiri dari suku Melayu, Jawa, Padang, Sunda, Batak, Medan, Bugis, Flores dan masih banyak suku-suku bangsa lainnya, baik secara turun temurun maupun hanya datang untuk mencari lapangan kerja. Pada umumnya suku jawa lebih dominan yang ada di Kota Batam dan suku melayu merupakan suku pribumi. Dalam melestarikan kearifan lokal budaya sangat penting untuk dilestarikan utamanya dalam birokrasi pemerintahan sebab budaya memiliki nilai-nilai kearifan dan tradisi yang luar biasa, selain itu, di Kota Batam merupakan salah satu daratan tumbuh kembangnya salah kebudayaan Melayu.

Abdullah (2017) menjelaskan bahwa Melayu merupakan salah satu etnis besar di Indonesia. Bahkan, etnis ini tidak hanya tersebar di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi saja tetapi juga di negara lain, yaitu: Malaysia dan Thailand Selatan. Kuatnya budaya Melayu pada waktu itu membuat pemerintah Indonesia memilih Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Akan tetapi eksistensi kebesaran Budaya Melayu menghadapi tantangan besar karena meskipun cukup berpengaruh, posisi Melayu belakangan ini kurang strategis dan pengaruhnya pun mulai berkurang. Budaya Melayu seakan mengalami kemunduran karena dianggap tidak mampu untuk menjawab tantangan-tantangan masa kini dan masa mendatang bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh hanya diam harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan eksistensi Budaya Melayu di Indonesia.

Pada kondisi sekarang, dalam kehidupan sosial budaya melayu semakin terdesak akibat dari kemajuan zaman, kemajuan teknologi informasi menjadi faktor utama dalam mengikis kebudayaan lokal. Batasan ruang semakin meluas dengan adanya kemajuan teknologi, akulturasi budaya semakin menyatu antara satu dengan yang lain, hal yang paling mengawatirkan adalah budaya impor seperti budaya asing (barat) menjadi semakin dominan dikalangan masyarakat dibandingkan dengan budaya lokal yang ada. Keadaan seperti ini harusnya perlu disadari baik dari masyarakat secara umum maupun pemerintah sehingga budaya-budaya lokal mampu dipertahankan dan dijaga dengan baik sehingga identitas keindonesian sebagai negara yang bersuku bangsa bisa tetap lestari dan terjaga dengan baik.

Penerapan Budaya Melayu untuk wilayah-wilayah kota semakin sulit dijumpai baik dalam kegiatan atau acara-acara resmi maupun pada acara-acara non-formal seperti perilaku sehari-hari misalnya berpantun. Semakin langkahnya penerapan budaya melayu dalam aktivitas sosial masyarakat, hal ini akan mempercepat proses kepunahan budaya Melayu itu sendiri sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia. Dikalangan masyarakat pulau-pulau atau pesisir dan pinggiran-pinggiran kota budaya Melayu tetap dipertahankan namun hanya sebagian kecil masyarakat saja, dan pada umumnya sudah bercampur baur dengan berbagai macam budaya, baik budaya lokal lainnya yang ada di Indonesia maupun budaya-budaya asing atau budaya luar negeri.

Menurut hasil kajian Hasse (2021) terkait identitas budaya Melayuyu Pertama, identitas Melayu dipertahankan melalui berbagai upaya, termasuk legitimasi kultural melalui kerjasama antara Lembaga Adat Melayu (LAM) dengan pemerintah daerah. Kedua, terdapat stigma terhadap identitas Melayu yang direspons dengan upaya membangkitkan kembali identitas secara utuh melalui berbagai simbol. Ketiga, identitas Melayu senantiasa diidentikkan dengan Islam sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ia tidak saja merupakan identitas kultural, tetapi juga agama. Ketiga hal tersebut, dalam perspektif teoretis dikenal dengan konstruksi identitas yang mencakup identitas legitimasi, resisten, dan proyek. Selain itu dari kajian Hasse juga merekomendasikan perlunya dilakukan berbagai kajian mengenai identitas lokal di Indonesia untuk dijadikan dasar pembangunan secara lebih luas sehingga tidak terjadi gesekan antara nilai-nilai lokal dengan semangat pembangunan yang lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai modernitas.

Syamsuadi A. (2018) Dalam tata kelola pemerintahan budaya Melayu Riau yang lebih menitikberatkan kepada kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai kemelayuan. Dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin melibatkan seluruh komponen, pemimpin bersikap transparan, bertanggung jawab dan efektif. Pemimpin menjamin tegaknya keadilan dalam bingkai supremasi hukum dan pemimpin juga memperhatikan kepentingan masyarakat dalam bidang sosial, politik dan ekonomi.

Karakteristik lain budaya Melayu dalam kehidupan sosial, umumnya lebih mengutamakan kedamaian dan menghindari konflik, menurut Alfarabi (2019) ketika orang Melayu berhadapan dengan konflik maka sedapat mungkin diselesaikan dengan cara menyenangkan kedua belah pihak. Tidak ada yang kehilangan muka adalah tujuan penyelesaian konflik. Dalam kehidupan sehari-hari konflik sedapat mungkin akan dihindari.

Budaya Melayu sejak jaman dahulu sudah mengajarkan agar perilaku atau budaya korupsi yang terjadi didalam birokrasi pemerintahan adalah sesuatu yang memalukan seperti yang dijelaskan oleh Sulistyawaty S. & Purba N. (2019) mengungkapkan dari hasil penelitian bahwa perilaku korupsi adalah hal yang memalukan, ajaran ini merupakan Kearifan Lokal yang sudah berakar dan dilaksanakan oleh masyarakat Melayu yang terangkum dalam Bentuk Tunjuk Ajar syair – syair, pantun-pantun, ungkapan-ungkapan yang mengandung nasehat kepada generasi penerus. Budaya Malu terhadap perilaku korupsi adalah merupakan Budaya yang perlu dipupuk dalam ber-sosial di dalam masyarakat, terutama adalah Malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan benar yang harus dibudayakan dalam aktivitas sehari hari sebagai dasar salah satu upaya untuk Pencegahan korupsi.

Putra (2009) Kebijakan pengembangan kebudayaan Melayu, atau disebut juga sebagai revitalisasi kebudayaan Melayu, merupakan langkah vital dalam proses pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kebijakan tersebut mengangkat harga diri masyarakat lokal dalam mengarungi era desentralisasi dan otonomi daerah, dalam penguatan identitas maupun ketahanan budaya. Pada saat yang sama, kebijakan itu juga berfungsi aktif sebagai penguat kohesi sosial dan integrasi sosial dalam masyarakat Kepulauan Riau yang majemuk. Revitalisasi kebudayaan Melayu berada dalam diskursus keindonesiaan dan tantangan global. Hal ini berkaitan dengan

posisi geografis Kepulauan Riau yang menjadi wilayah perbatasan negara, sekaligus wilayah interaksi antarbangsa.

Seiring berjalannya waktu pemerintah daerah perlu menyadari bahwa kearifan lokal harus ditumbuhkan sebagai karakter dan identitas sebuah daerah, kesadaran akan kearifan lokal dilatar belakangi oleh terkikisnya budaya-budaya lokal akibat dari arus modernisasi yang begitu maju dan berkembang pesat, selain itu budaya melayu mulai terkikis dari dalam sebagai akibat dari masyarakat multikultur. Secara historis kebudayaan melayu merupakan budaya yang memiliki ketenaran yang sangat luar biasa di masa lampau. Hampir sebagian besar daratan kepulauan yang ada di Indonesia, mempengaruhi kebudayaan lokal yang ada di daerah lainnya, seperti bahasa melayu pada umumnya diserap menjadi bahasa nasional Indonesia.

Hasil penelitian Lubis Dkk. (2022) terkait dengan penerapan budaya Melayu yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II dinilai berhasil dalam memperkuat kedudukan dan kekuasaannya dari ancaman internal dan eksternal. Ia menciptakan keseimbangan dengan memodifikasi sistem birokrasi warisan budaya Melayu dengan mengadopsi unsur sistem kepemimpinan kerajaan Melayu-Islam. Unsur Melayu-Islam yang tampak diterapkan dalam restrukturisasi birokrasinya ada enam unsur, seperti penguatan kedudukan syahbandar, penguatan kedudukan penghulu, pemeliharaan UU Simbur Cahaya, pemeliharaan dan pengaturan kelas sosial, mengatur perbedaan wajib pajak (sistem tiban tukon), serta mengendalikan loyalitas elite dengan sistem lungguh (apanage). Restrukturisasi birokrasi yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II terbukti praktis membuat pemerintahan kesultanan menjadi lebih stabil, efektif, efisien, memperkuat monopoli perdagangan, dan membawa kemakmuran.

Pada masa lampau pola atau bentuk birokrasi kerajaan Melayu sangat jauh berbeda dengan pola kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara utamanya kerajaan jawa, pola birokrasi kerajaan melayu raja tidak sebagai penjelmaan dewa semua perintah raja belum tentu benar dan dapat ditentang, sehingga mencerminkan prinsip demokrasi, karena bentuk kerajaan maritime dan dagang rakyat tidak dibebani sama sekali baik pajak maupun tenaga kerja sehingga ikatan antara raja dengan rakyatnya tidak bersifat Feodalisme. Alat kekuasaan pemerintah disebut orang kaya, yang dibawahnya tidak memiliki pejabat yang berlapis-lapis yang tugasnya tidak memungut pajak

(upeti dan tenaga kerja) dari rakyat sehingga mekanisme pelaksanaan birokrasinya tercemrin sederhana dan rasional.

Budaya birokrasi pemerintah daerah dengan budaya lokal (budaya Melayu) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan konteks kewilayahan. Budaya birokrasi pemerintah daerah dengan budaya lokal masyarakat dalam hal ini Budaya Melayu, seharusnya saling mengisi satu sama lain sehingga ada sinergi antara budaya lokal dengan budaya kerja birokrasi pemerintah daerah. Contohnya seperti budaya keterbukaan atau kebenaran yang ada pada masyarakat melayu sama dengan prinsip kinerja birokrasi yakni transparansi, jika budaya keterbukaan atau kebenaran dilakukan dalam pemerintahan berarti sama halnya menerapkan prinsip transparansi dalam menjalankan kinerja pemerintahan.

Budaya melayu merupakan budaya yang sangat terbuka dan dapat diterima semua kalangan, baik suku, etnis, maupun agama, memiliki nilai-nilai yang sangat umum (general). budaya Melayu seharusnya bukan hanya bahasanya yang diterapkan dalam negara Indonesia tetapi juga nilai-nilai budaya lain seperti norma, etika, dan gaya komunikasi dapat dipraktekkan dalam budaya birokrasi di Indonesia.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan kajian secara spesifik dan mendalam mengenai keterkaitan, korelasi dan atau pengaruh budaya lokal terhadap budaya birokrasi pemerintah kota Batam, Sehingga kita bisa mengetahui ciri, identitas, dan karakter budaya birokrasi pemerintah kota Batam.

METODOLOGI

Penelitian kualitatif menjelaskan dan mendeskripsikan tentang budaya birokrasi terhadap pelayanan di kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara kepada pihak yang memiliki keterkaitan terhadap objek yang diteliti seperti aparatur sipil negara dan masyarakat, kemudian pendekatan dokumentasi menganalisis dokumen baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, gambar, maupun media lainnya. Melakukan kajian literatur yang memiliki kaitan terhadap objek penelitian dan pendekatan observasi dilapangan melihat secara langsung dan melakukan interaksi lebih mendalam terhadap objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada sekitar sepuluh Nilai-nilai Budaya Melayu yang dapat ditelusuri melalui pola yang selama ini berkembang dalam masyarakat Melayu yang dikemukakan oleh Venus A. (2015) dalam bukunya falsafah komunikasi orang Melayu yakni sebagai berikut: (1). Nilai keterbukaan dan kebenaran (2). Penghargaan (3). Kerja sama (4). Kesepahaman (5). Penyesuaian diri (6). Kesantunan (7). Permaafan (8). Kewajaran (9). Kepercayaan (10). Bertimbang rasa. Dari sepuluh kebiasaan hidup orang Melayu akan dijelaskan secara deskriptif dalam kaitannya dengan budaya yang berkembang di lingkungan birokrasi pemerintah kota Batam.

Nilai Keterbukaan dan Kebenaran

Penerapan budaya Melayu dalam budaya birokrasi pemerintah daerah dapat dilihat dari berbagai aspek yakni salah satunya nilai keterbukaan dan kebenaran. Pada nilai ini dalam konteks masyarakat Melayu sangat terbuka terhadap siapapun yang ingin berinteraksi dalam kehidupan sosialnya. Masyarakat Melayu tidak memiliki karakter menutup diri atau menutup-nutupi sebuah masalah, atau arti kata lain bahwa masyarakat Melayu selalu menyatakan sesuatu yang benar atas apa yang dianggap benar.

Pola kehidupan atau perilaku masyarakat Melayu yang menjunjung nilai-nilai keterbukaan dan nilai kebenaran telah terbukti bisa hidup rukun dan damai dari berbagai latar agama maupun suku yang ada di Nusantara. Sikap terbuka dan menjunjung nilai kebenaran merupakan perekat kebersamaan dari berbagai latar belakang suku dan agama yang hidup di wilayah Melayu. Pada konteks nilai dan budaya Melayu yang ada di kantor pemerintah daerah, dengan menerapkan nilai keterbukaan dan kebenaran jika dilihat dari pola pergaulan keseharian pegawai yang ada di sana cukup berjalan dengan baik. Sistem pergaulan antara sesama pegawai cukup cair, selain itu dan sangat terbuka baik dari segi komunikasi maupun perilaku yang tidak membatasi, baik secara struktur jabatan, umur, suku maupun agama. Budaya Melayu dan budaya kerja birokrasi pemerintah daerah dalam hal nilai keterbukaan dan kejujuran bahwa nilai budaya Melayu yakni nilai keterbukaan dan kebenaran telah menyatu dengan budaya kerja birokrasi yang ada di kantor-kantor pemerintah daerah.

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melihat bahwa kekerabatan dari sebuah keterbukaan yang ditunjukkan oleh para pegawai yang ada di kantor-kantor pemerintah, memang

betul-betul cair, perbedaan pangkat ataupun golongan jabatan tidak begitu nampak dalam pergaulan keseharian di kantor, begitupun mengenai suku maupun agama, semuanya menyatu dalam pergaulan. Penerapan nilai keterbukaan (transparansi) dan kebenaran (kejujuran) dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena dengan kejujuran dan keterbukaan tersebut tidak perlu merasa takut akan terjadinya penyimpangan ataupun pihak auditor mengaudit kinerja karena nilai-nilai kejujuran dan transparansi sudah dijalankan dengan baik.

Penghargaan

Penghargaan merupakan rasa penghormatan kepada orang lain baik atas prestasi atau capaian yang diraih seseorang atau penghargaan bisa juga kepada orang yang belum dikenal, seperti tamu atau ketika ada orang tiba-tiba memberi pertolongan disaat lagi membutuhkan, maka orang mendapat pertolongan akan memberi ucapan terima kasih sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang menolong tersebut. Penghargaan sifatnya sangat luas baik dalam bentuk materi maupun non materi. Penghargaan bentuk materi bisa dalam bentuk emas, uang ataupun cendera mata, sedangkan non-materi penghargaan bisa berwujud perilaku seperti tersenyum, salaman, atau memberi pertolongan dalam bentuk fisik.

Nilai Penghargaan dalam bentuk budaya melayu seperti yang diungkapkan sebelumnya, masyarakat melayu dalam memberi penghargaan kepada orang lain seperti menjamu tamu dengan baik jika ada orang yang bertamu kerumah mereka, memberi sapa jika ketemu di jalan, memberikan sesuatu barang atau benda kepada teman atau yang mengunjungi mereka. Dalam instansi pemerintahan dalam hal nilai penghargaan dapat dilihat baik penghargaan dalam bentuk struktural maupun penghargaan dalam bentuk keseharian. Budaya saling menghargai antara sesama pegawai ataupun pegawai dengan pimpinan dan penghormatan pimpinan dengan pegawainya telah diwujudkan dalam budaya kerja birokrasi pemerintah daerah.

Penghargaan pimpinan kepada pegawai yang dilakukan selama ini dengan memberi kesempatan kepada setiap pegawai untuk memiliki kesempatan yang sama untuk bisa meraih posisi atau jabatan dengan melihat kompetensi dan golongan kepangkatan yang dimiliki oleh setiap pegawai. Penghargaan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bisa dalam bentuk fisik

maupun non fisik di kantor pemerintah kecamatan sagulung bentuk penghargaan yang diberikan pimpinan kepada pegawai adalah berbuat adil pada setiap pegawai yang memiliki kompetensi dan kepangkatan yang sesuai akan mendapatkan jabatan yang sesuai. Bentuk penghargaan dalam bentuk fisik juga dilakukan di kantor-kantor pemerintah dalam mendorong kinerja pegawai yakni seperti pemberian sertifikat dan trofi untuk pegawai yang berprestasi atau dalam hal ini pegawai yang memiliki kinerja yang baik. Tujuan diberikannya penghargaan dalam bentuk fisik atau materi ini adalah supaya pegawai yang lain bisa melihat bahwa dengan kegiatan semacam ini bisa mendorong pegawai-pegawai yang lain bisa bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Kerja sama

Kerjasama merupakan hal penting dalam bekerja. Hal ini dilakukan agar komunikasi antara pemimpin maupun para pegawai bisa lebih terbuka. Dalam kerjasama juga harus meningkatkan koordinasi. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan yang diharapkan bisa dicapai. Kerjasama dalam masyarakat melayu sering dikenal dengan istilah gotong royong baik dalam bekerja sehari-hari maupun dalam membantu keluarga untuk masalah keuangan. Kerjasama adalah sebuah budaya karena sesuatu yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat melayu. Masyarakat melayu tidak mengenal budaya individualis atau hidup sendiri, masyarakat melayu sangat terbuka sehingga menjadi jalan untuk bisa bekerjasama antara sesama. Sangat suka bergaul dan berbalas pantun hal inilah menjadi budaya masyarakat melayu untuk membangun sebuah hubungan yang baik, dengan adanya hubungan yang baik atau kekerabatan yang kuat melahirkan sebuah kerja sama yang baik.

Dalam budaya kerja pemerintah daerah untuk membangun sebuah kerjasama yang baik, dilakukan dengan cara membangun keakraban antara sesama pegawai, membangun ikatan emosional antara satu dengan yang lainnya, hal ini sering dilakukan dalam berbagai kesempatan seperti acara atau kegiatan yang sifatnya bisa menumbuhkan ikatan emosional antara satu dengan yang lain.

Kerjasama sesama antara sesama antara pegawai sangat penting untuk ditumbuhkan dan dijaga dengan baik, karena kerjasama merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menempuh sebuah tujuan kerja. Jika kerjasama antara sesama pegawai tidak terjaga dengan baik konflik

internal maupun kepentingan akan semakin membesar dan menjadi-jadi dan pada akhirnya akan berakibat pada kinerja yang tidak maksimal. Pemerintah daerah sangat sadar akan arti pentingnya kerjasama antara pegawai yang ada maupun kepada pimpinan. Kesadaran tersebut selalu dijaga dan dipelihara dengan baik. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat, seperti kebersihan lingkungan. Masyarakat dan pemerintah kecamatan kerja bakti bersama dalam menyikapi kondisi musim banjir di beberapa titik lokasi di daerah tersebut.

Kesepahaman

Membangun Kesepahaman merupakan suatu budaya bagi masyarakat melayu, kesepahaman merupakan sebuah karakter masyarakat melayu melalui pola komunikasi yang dituangkan dalam bentuk berbalas pantun. Kebiasaan masyarakat melayu dengan berbalas pantun merupakan cara untuk membangun kesepahaman antara berbagai pihak. Dalam kehidupan masyarakat melayu sangat sering dijumpai dengan kebiasaan tersebut. Pola atau karakter yang dibangun pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja salah satunya adalah membangun kesepahaman baik antara sesama pegawai, pimpinan maupun kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Namun konteks kesepahaman yang dibangun oleh pemerintah Kecamatan Sagulung dengan masyarakat melayu agak sedikit berbeda. Pemerintah daerah dalam membangun sebuah kesepahaman melalui pendekatan formal seperti pidato atau pengarahan secara langsung, sedangkan untuk masyarakat melayu seperti yang dikemukakan sebelumnya adalah lebih kependekatan pantun, tapi secara substansi sama yakni membangun kesepahaman. Budaya birokrasi pemerintah kecamatan Sagulung selalu menekankan budaya atau nilai kesepahaman baik melalui kegiatan formal seperti rapat koordinasi antara sesama Kasi maupun kesemua pegawai yang ada di kantor kecamatan.

Kesepahaman bukan hanya pada tingkat antara sesama pegawai ataupun dengan pimpinan tetapi Pemahaman juga sangat ditekankan pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh wali kota Batam, tujuannya adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Penyesuaian diri

Bagi orang melayu, melakukan penyesuaian diri adalah cara hidup yang sangat dianjurkan, termasuk dalam komunikasi. Konsep seiya sekata sangat terkenal dalam dilingkungan masyarakat melayu pada perinsipnya adalah mekanisme penyesuaian diri. Bila kita ingin orang lain setuju dengan kita maka “seiya-lah” dulu dengan orang tersebut. Pahami isi hatinya, pahami maksudnya. Dengan berempati seperti itu, orang merasa diterima dan resistensi pun hilang. Dan akhirnya orang tersebut akan “sekata” dengan kita. Orang akan setuju dan sukarela.

Penerapan Penyesuaian diri dalam pergaulan di lingkungan kantor secara alamiah sudah diterapkan oleh sebagian pegawai yang secara kesukuan berdarah melayu, sikap yang ditunjukkan seiya sekata, atau sikap yang berempati kepada rekan-rekan kerja. Disisi yang lain ada sebagian kecil dari pegawai untuk mengikuti penyesuaian diri ini masih sulit untuk dilakukan karena karakter bawaan. Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda, seperti halnya di kantor pemerintah bahwa secara budaya kemelayuan pada umumnya bersikap seiya sekata atau membangun rasa empati kepada orang lain, hal ini yang nampak pada bagian pelayanan, yang selalu menunjukkan rasa empati terlebih dahulu kepada masyarakat yang ingin dilayani.

Kemampuan setiap pegawai untuk dapat melakukan penyesuaian diri dilingkungan kantor menjadi tuntutan setiap pegawai karena penyesuaian diri sangat erat kaitannya dengan kerja sama antara sesama pegawai. Adanya kerja sama yang baik antara sesama pegawai merupakan kunci keberhasilan kinerja di kantor pemerintah.

Warga masyarakat sangat beragam baik dari segi agama maupun suku bangsa maka dari itu sebagai pemerintah harus mampu menyesuaikan diri pada setiap warga masyarakat yang memiliki karakter masing-masing, selain itu dikantor memiliki budaya atau suku yang berbeda-beda maka harus bisa bersikap yang semestinya dan sewajarnya.

Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan hal yang sangat penting dalam sebuah masyarakat yang multi etnis karena hal ini bisa saling memahami satu sama lain, jika masyarakat ataupun pegawai yang ada di kecamatan sagulung tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan maka sulit untuk bisa berbaur antara sesama yang lain.

Kesantunan

Kesantunan merupakan nilai atau norma yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kesantunan hampir dapat ditemukan disetiap tempat keseharian, baik di hotel, bank, maupun dikantor-kantor lainnya. Kesantunan yang sering kita temukan di kantor-kantor dalam hal pelayanan merupakan kesantunan yang sifatnya formalitas, disisi yang lain kesantunan yang sifatnya alamiah dapat kita temui dalam pergaulan sosial, seperti di kampung-kampung. Pada dasarnya kesantunan dalam sebuah masyarakat melayu ditunjukkan dalam berbagai hal baik melalui tutur kata atau bahasa, cara berkomunikasi, berpakaian maupun dengan memperlakukan orang lain layaknya seorang raja, seperti mengadakan upacara penyambutan yang meriah dan penuh suka cita.

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melihat bahwa sikap kesantunan ditunjukkan melalui cara berkomunikasi, menyapa, maupun ditunjukkan melalui cara berpakaian yang kental dengan budaya melayu. Penerapan kesantunan di kantor pemerintah merupakan suatu keharusan bagi setiap pegawai baik berinteraksi satu sama lain maupun dengan masyarakat itu sendiri. Karena dengan sikap yang santun akan memudahkan urusan pekerja yang ada di kantor pemerintahan.

Sikap santun dalam pergaulan sari-hari merupakan suatu kebutuhan mendasar yang harus diterapkan kepada setiap orang karena rasa sikap santun akan melahirkan kewibawaan bagi orang yang santun tersebut, beda halnya jika bersikap arogan atau berperilaku smena-mena orang lain akan tidak hormat dan bisa menimbulkan perselisihan baik dilingkungan kantor maupun dimasyarakat. Sikap santun merupakan kunci untuk saling menghormati, seperti yang diungkapkan diatas bahwa jika pemerintah tidak berperilaku santun kepada masyarakat bagaimana bisa masyarakat santun kepada pemerintah. Sikap santun harus menjadi perhatian khusus utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat dan ini harus ditekankan pada setiap pegawai yang ada utamanya di kantor-kantor pemerintah.

Permaafan

Budaya pemaaf atau permaafan adalah nilai yang didasari dari kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang rentan berbuat salah. Orang melayu sepenuhnya sadar dalam komunikasi atau bertingkah laku berpotensi untuk berbuat salah. Ketika salah paham terjadi, tugas pelaku adalah meminta maaf sebagai tertuang dalam peribahasa “salah langkah kaki surut, salah minta maaf” atau ungkapan sejenis “salah langkah berbalik, salah langkah dimuntahkan, salah ucap minta maaf. Permintaan maaf adalah mekanisme untuk menormalisasi hubungan yang cedera dan mengurangi rasa yang sakit yang ditimbulkan akibat dari komunikasi yang buruk.

Budaya pemaaf atau rasa pemaaf dalam pergaulan di lingkungan kator kecamatan sagulung selalu ditekankan agar bisa menghindari permasalahan yang lebih besar. Pada persoalan yang sering terjadi adalah ketika berurusan dengan pelayanan kepada masyarakat terkadang masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah karena berbagai alasan, maka dari itu untuk menghindari permasalahan yang lebih besar setiap staf yang memberikan pelayanan dituntut melakukan minta maaf terlebih dahulu, baru menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Budaya minta maaf merupakan suatu kebiasaan dalam keseharian masyarakat melayu begitupun dengan pemerintah daerah, karena budaya minta maaf ini merupakan pemutus permasalahan yang lebih besar.

Kewajaran

Orang melayu berkembang dari budaya pantai yang membuka ruang interaksi yang luas dengan berbagai suku bangsa. Lingkungan yang multibudaya seperti itu membuat mereka bersikap egaliter. Sikap egaliter ini membuat orang melayu memperlakukan siapapun secara sepiantasnya atau sewajarnya saja. Tidak berlebih-lebihan atau kekurangan. Dalam kultur melayu, pemimpin pun bukan untuk disembah-sembah, melainkan adalah seorang yang harus dihormati dalam bentuk “selangkah didahulukan” dan “seranting ditinggikan”. Sikap merasa setara membuat orang melayu lebih suka berkomunikasi dengan cara yang wajar, tidak terlalu merendah tidak juga merasa lebih tinggi. Sikap seperti ini, dalam istilah melayu, disebut berpada-pada yang artinya ditengah-tengah saja.

Kewajaran merupakan sikap memperlakukan seseorang dengan perilaku yang sewajarnya. Kewajaran dalam budaya birokrasi pemerintah yakni memperlakukan seseorang dengan apa adanya, jika berhadapan dengan seorang pimpinan memperlakukannya sebagaimana pimpinan, tidak berlebihan dan tidak pula merendahkan, seperti halnya dengan sesama rekan kerja memperlakukan dengan sewajarnya.

Di kantor pemerintah budaya kewajaran telah dilakukan sebagaimana mestinya, seorang pimpinan diperlakukan sebagaimana mestinya tidak dilebihkan maupun direndahkan, tetapi sewajarnya, hubungan sesama pegawai pun juga begitu, tidak ada yang direndahkan karena status pekerjaan maupun golongan atau pangkat jabatan, semuanya bergaul dengan standar kewajaran. Perilaku kewajaran yang nampak di kantor-kantor pemerintah daerah, sudah berjalan dengan baik, sikap yang berlebihan yang ditunjukkan baik oleh pegawai maupun pimpinan sudah sewajarnya sesuai dengan posisi atau jabatan masing-masing.

Kepercayaan

Ungkapan melayu menyatakan “sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya”. Ungkapan ini memperlihatkan bahwa akibat dari kebohongan atau ketidak jujuran adalah hilangnya kredibilitas seseorang. Ketika seseorang kehilangan kepercayaan dari orang lain, pesan-pesan yang disampaikan tidak bernilai atau bermakna. Konsekuensi segala upaya komunikasi yang dilakukan orang tersebut akan mendapatkan penolakan dari orang lain. Terlebih bila orang tersebut mempengaruhi orang lain, segala upaya akan sia-sia. Kepercayaan baik sesama pegawai maupun dengan masyarakat dilingkungan kantor Kecamatan Sagulung sangat dijaga dengan baik, karena kepercayaan merupakan modal sosial yang harus dipelihara. Sikap percaya sesama rekan kerja dalam budaya kerja birokrasi pemerintah adalah hal yang utama karena sikap saling percaya dapat mewujudkan solidaritas dan dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi kinerja. Adanya kepercayaan akan melahirkan hubungan yang baik dan membangun keakraban satu dengan yang lainnya.

Kepercayaan merupakan hal yang sangat sulit didapat harus melalui proses yang panjang dan ujian, kepercayaan tidak mudah didapatkan begitu saja tanpa melalui proses. Pemerintah Kecamatan Sagulung selalu mendorong rasa saling percaya antara sesama pegawai agar mereka

dapat saling bekerja sama. Adanya rasa saling percaya akan menciptakan suasana kerja yang kondusif, sehingga hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja lebih baik.

Sikap saling percaya dalam dunia kerja utamanya di instansi pemerintah sangat dibutuhkan karena dengan adanya rasa saling percaya baik dari sesama pegawai maupun dari masyarakat itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara. Namun jika rasa tidak saling percaya dalam lingkungan kerja tidak ada maka hal ini sangat buruk bagi kinerja itu sendiri dan sangat menghambat dan saling merugikan.

Bertimbang Rasa

Nilai bertimbang berasa ini memiliki dimensi yang luas, mencakup tenggang rasa, toleransi, dan solidaritas. Empati tenggang rasa diartikan sebagai kemampuan merasakan posisi dan situasi orang lain, sedangkan toleransi adalah penghormatan pada cara pandang atau kepercayaan orang lain dan membiarkan mereka melaksanakan apa yang mereka yakini. Sedangkan solidaritas diartikan sebagai sifat satu rasa atau setia kawan. Orang solidier bisa berempati dengan kesulitan atau penderitaan orang lain.

Budaya bertimbang rasa dalam interaksi atau pergaulan antara sesama pegawai di kantor pemerintah kota Batam selama ini cukup tinggi, jiwa toleransi dan selidaritas atau rasa kebersamaan sangat kuat hal ini nampak dari cara berinteraksi selama ini. Dalam pergaulan keseharian anatara sesama pegawai sangat akrab dan saling memahami kondisi masing-masing, jiwa solidaritas untuk saling membantu baik masalah kerjaan maupun masalah-masalah yang sifatnya pribadi.

Bertimbang rasa atau tenggang rasa di kantor pemerintah telah berjalan cukup lama dan menjadi perekat persaudaraan yang ada. Bertimbang rasa merupakan bahasa lain dari mengerti perasaan orang lain. Kondisi lingkungan kantor pemerintah yang memiliki pegawai berbagai macam etnis dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda sangat penting untuk saling memahami satu sama lain, dalam arti bahwa memiliki sikap toleran atau bertimbang rasa tersebut. Sikap toleransi dan solidaritas merupakan sikap yang harus ditumbuhkan dan dijaga dengan baik oleh pegawai itu sendiri maupun masyarakat kerana sikap tersebut memiliki manfaat yang sangat besar.

KESIMPULAN

Dari berbagai indikator penelitian yakni Nilai keterbukaan dan kebenaran, Penghargaan, Kerja sama, Kesepahaman, Penyesuaian diri, Kesantunan, Permaafan, Kewajaran, Kepercayaan dan Bertimbang rasa. Nilai keterbukaan dan kebenaran yang ada di kantor pemerintah daerah memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mendorong kinerja menjadi lebih baik karena dengan adanya keterbukaan dan kebenaran tersebut menciptakan suasana kerja yang transparan sehingga pegawai tidak merasa takut ketika mereka diaudit atau ada pemeriksaan. Penghargaan, menjadi sesuatu yang penting dalam menjalankan kinerja, penghargaan yang diberikan bukan hanya dalam bentuk materil tapi juga penghargaan non materil seperti rasa hormat-menghormati. Kerja sama, di kantor pemerintah kota Batam memiliki pengaruh cukup besar dalam kinerja karena dengan adanya kerjasama ini, pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Kesepahaman, menjadi perekat hubungan antara sesama pegawai yang ada di pemerintah daerah kesepahaman akan melahirkan sebuah kesepakatan kerja, dengan adanya kesepakatan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja yang lebih baik. Penyesuaian diri dalam mempengaruhi kinerja pegawai yang ada di pemerintah daerah memiliki peranan yang cukup besar karena dengan adanya penyesuaian diri ini mendorong pegawai bisa bekerja sama dengan baik. Kesantunan, juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi kinerja pegawai dengan adanya kesantunan antara sesama pegawai menciptakan suasana kerja yang baik. Permaafan, memiliki fungsi yakni mencegah permasalahan menjadi lebih besar dalam kinerja pada khususnya di kantor pemerintah daerah. Kewajaran, yang terjadi di kantor pemerintahan yakni berperilaku dengan kesewajaran tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi mengenai sesuatu yang dikerjakan, baik dalam bersikap sehari-hari maupun menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Kepercayaan yang ada di kantor pemerintah merupakan kunci keberhasilan kinerja karena kepercayaan yang terbangun adalah sikap kejujuran, rasa saling menghargai, kesopanan dan lain sebagainya dengan suasana kerja tersebut melahirkan kondisi lingkungan kerja yang baik. Bertimbang rasa atau dengan kata lain yakni tenggang rasa, toleransi, dan solidaritas juga memiliki pengaruh sangat besar dalam meningkatkan kinerja pegawai karena dengan hal tersebut terbangun jiwa kebersamaan dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2017). *Glokalisasi Identitas Melayu: Potensi dan Tantangan Budaya dalam Reproduksi Kemelayuan*. Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 6(2).
- Antar, Venus. (2015). *Filsafat Komunikasi Orang Melayu*. Bandung: Simbiosis Reksatama Media.
- Asrinaldi, Azwar. (2018). *Dimensi Kekuasaan Penghulu Adat Melayu Riau Dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal*. Jurnal antropologi fisip Unand, 20(1).
- Effendy, Tenas. (2013) *Kearifan Pemikiran Melayu*. Pekanbaru: Tenas Effendy Foundation.
- Jubba, Hasse., Muh Rafi., & Zuly Qodir. (2021). *Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas*. Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 3(1).
- Lubis, H.S.D., Tanjung T., & Muhajir A. (2022). *Pendekatan Elemen-Elemen Melayu-Islam dalam Restrukturisasi Birokrasi pada Kesultanan Palembang Darussalam oleh Sultan Mahmud Badaruddin II*. Patrawidya, 23(2).
- Long, Nikholas J. (2012). *being malay in Indonesia: Histories, Hopes And Citizenship In Riau Archipelago*. Singapura: asian studies of Australia association bekerja sama dengan NUS dan NIAS press
- Rivai, Abdul. (2013). *Budaya Kerja Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Academia Fisip Untad, 5(1).
- Sobri, Kiagus Muh. (2009). *Penerapan Nilai Budaya Melayu Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi Indonesia*. Jurnal aplikasi manajemen, 7(2).
- Sulistiyawaty S, & Purba N. (2019). *Strategi Pencegahan Korupsi Dengan Budaya Malu (Studi Komparatif Masyarakat Melayu Indonesia Dengan Jepang*. Jurnal Penelitian Pendidikan dan Sosial Humaniora, 4(1).
- Supriadi G & Guno T. (2009). *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Thoha, Miftah.(2012). *Birokrasi Pemerintah Dan Kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Zainuddin, M.(2018). *Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam Melestarikan Wisata Budaya di Provinsi Riau*. Jurnal Agregasi, 6(1).